

## ABSTRAK

### **KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP HARTA BERSAMA AKIBAT DARI PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KENDAL (Studi Kasus Putusan No. 583/Pdt.G/PA.Kdl di Pengadilan Agama Kabupaten Kendal)**

Kenyataan yang ada di dalam kehidupan masyarakat Indonesia sekarang ini khususnya di Kabupaten Kendal, mayoritas masyarakatnya beragama Islam menunjukkan bahwa setelah terjadinya suatu perceraian, persoalan yang dipermasalahkan oleh kedua belah pihak (suami-isteri) adalah mengenai kedudukan harta bersama yang penyelesaiannya dilakukan di Pengadilan Agama Kendal, ini berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor : 583/Pdt.G/PA.Kdl yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Tujuan penulisan tesis ini untuk memahami akibat hukum yang timbul dari perceraian terhadap harta bersama, memahami pelaksanaan pembagian harta bersama dan kendala-kendala yang sering muncul dalam pelaksanaan pembagian harta bersama beserta caia penyelesaiannya di Pengadilan Agama Kendal.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu penulis berusaha melakukan pendekatan dengan masalah yang diteliti sesuai dengan sifat hukum riil yang berlaku di masyarakat. Teknik pengumpulan sample berbentuk purposive sampling yang didasarkan pada tujuan tertentu.

Akibat hukum yang timbul dari perceraian terhadap harta bersama yaitu setelah adanya perkawinan, harta kekayaan yang diperoleh baik dari suami atau isteri menjadi harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin dan jika perkawinan putus, masing-masing berhak separuh dari harta bersama tersebut. Pelaksanaan pembagian harta bersama dari perceraian dimulai dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak, setelah syarat-syarat untuk pengajuan terpenuhi maka proses pembagian harta bersama diproses, sesuai Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor : 583/Pdt.G/PA.Kdl menetapkan pembagian harta bersama seperdua bagian untuk penggugat dan seperdua bagian untuk tergugat. Kendala-kendala dan penyelesaiannya, tanah yang di anggap sebagai harta bersama oleh tergugat, dalam hal ini perlu menghadirkan saksi-saksi di persidangan untuk membuktikannya. Pembagian harta bersama berbentuk. tanah yang berbidang-bidang, ditempat yang berbeda-beda telah dibagi seperdua tapi para pihak tidak puas maka Hakim, Panitera, Juru sita mengambil bidang tanah lain yang lebih mahal atau lebih murah untuk menutup kekurangan dalam pembagian harta bersama dengan perhitungan yang cermat. Terhadap barang sengketa yang merupakan harta bersama yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal, dengan menyampaikun surat permohonan bantuan pemeriksaan {*decente*} kepada Pengadilan Agama Kendal dengan tujuan dibantu dalam peminjaman tempat dan dibantu dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat (*decente*).

Kesimpulan dari penulisan tesis ini bahwa pembagian harta bersama akibat dari perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kendal menetapkan pembagian harta bersama separuh untuk penggugat dan tergugat.

Kata kunci : *Perceraian, Harta Bersama*

## ABSTRACT

### **ISLAMIC LAW STUDY ON EFFECTS OF DIVORCE ON COMMON PROPERTY IN THE KENDAL DISTRICT COURT RELIGION (Case Study of Decision No. 583/Pdt.G/PA.Kdl in Kendal District Religious Court)**

Most of Indonesia people believe in Islam, including the Klaten Society. The fact indicates that, problem raised by the both parties (husband and wife) after happening divorce is the status of *gono-gini* property. This case was decided by Kendal Religious Court Decision No. 583/Pdt.G/PA.Kdl.

The objective of this thesis is to understand legal implication of divorce relating to *gono-gini* property, to understand implementation of common property share and method of resolution at Kendal Religious Court.

The used approach is socio-legal approach. It means that the author endeavors doing approach suitable to law in society. Sample collecting method is purposive sampling under certain goal.

Legal implication of divorce relating to *gono-gini* property is as follows: the property obtained from either husband or wife being *gono-gini* property as long as not provided in marriage agreement but if it happens divorce, each entitles half of the common property. The implementation of *gono-gini* property share because of divorce begins with filing sue by one of the parties aibr fulfilling the conditions. Thus, based on Article 97 Islam Law Compilation, Kendal Religious Court Decision No : 583/Pdt.G/PA.Kdl provided that share of *gono-gini* property divided one second for plaintiff and one second for defendant To overcome obstacles in relation to land as *gono-gini* property, it needs some witnesses to be attended before the court to prove it. Share of *gono-gini* properly in form of land at the different places was divided one second but the parties not satisfied to the decision. Regarding to the problem, Judges, Registrar and Bailiff took other more expensive and cheaper land to compensate insufficiency of *gono-gini* property share by detail calculation. The common property locates in the jurisdiction of Kendal Religious Court, by submitting an application for inqiiy assistance {*decente*) to Kendal Religious Court to be assisted for borrowing place and assisted for executing local inquiry (*decente*).

It is concluded that share of *gono-gini* property, as a result of divorce is half for plaintiff and half for defendant It is based on Kendal Religious Court Decision.

Key words : *divorce, common property.*